

RINGKASAN

Edi Hermawan NIM. 202002020072. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Studi Penelitian di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar) Pembimbing I: Dr. Teguh Pramono, M.Si dan Pembimbing II: Dr. IGG. Heru Marwanto, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional di Kabupaten Blitar serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori dari Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di Kabupaten Blitar telah berjalan baik, meskipun menghadapi beberapa kendala. Komunikasi efektif dengan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Namun, sumber daya manusia yang terbatas, hanya tiga petugas, tetap kompeten dalam menjalankan tugas dengan dukungan pedoman pelaksanaan dan wewenang yang jelas. Fasilitas masih membutuhkan pembaruan perangkat keras dan anggaran terbatas. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen tinggi dalam menyampaikan informasi, meski belum ada insentif dari pemerintah. Struktur birokrasi dengan SOP yang jelas dan kolaborasi yang baik dengan Dinas Kominfo mendukung pelaksanaan kebijakan. Faktor pendukung termasuk sosialisasi intensif, evaluasi rutin, komitmen pelaksana, dan koordinasi antar lembaga. Kendala utama meliputi akses internet terb atas di pedesaan, jumlah staf yang tidak memadai, anggaran yang kurang, dan absennya insentif untuk pelaksana kebijakan. Untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan JDIH di Kabupaten Blitar, prioritaskan pengembangan infrastruktur internet pedesaan, rekrut staf teknologi informasi, perluas anggaran JDIH, berikan insentif implementor kebijakan, dan tingkatkan kerjasama antar lembaga terkait.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

SUMMARY

Edi Hermawan NIM. 202002020072. Implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 concerning the National Legal Documentation and Information Network (Research Study in the Legal Section of the Regional Secretariat of Blitar Regency) Supervisor I: Dr Teguh Pramono, M.Si. dan Pembimbing II : Dr.IGG.Heru Marwanto, MM

This study aims to describe and analyze the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 on the national legal documentation and information network in Blitar Regency, as well as its supporting and inhibiting factors. The research method uses a qualitative approach. The research focus employs Edward III's theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use interactive analysis techniques. The results of the study show that the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2012 on the National Legal Documentation and Information Network in Blitar Regency has been running well, although facing some obstacles. Effective communication with the community is conducted through socialization involving community leaders and village officials. However, limited human resources, with only three officers, remain competent in performing their duties with the support of clear implementation guidelines and authority. Facilities still need hardware updates and have limited budgets. The disposition of the implementers shows a high commitment to delivering information, although there are no incentives from the government. The bureaucratic structure with clear SOPs and good collaboration with the Department of Communication and Information supports policy implementation. Supporting factors include intensive socialization, regular evaluations, the commitment of implementers, and inter-agency coordination. Major obstacles include limited internet access in rural areas, insufficient staff, inadequate budgets, and the absence of incentives for policy implementers. To overcome the barriers to JDIH policy implementation in Blitar Regency, prioritize the development of rural internet infrastructure, recruit IT staff, expand the JDIH budget, provide incentives for policy implementers, and enhance inter-agency cooperation.

Keywords: *Implementation, Public Policy, National Legal Documentation and Information Network*